

PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA SYARIKAT ISLAM BANJARNEGARA DALAM PILKADA KABUPATEN BANJARNEGARA 2017

Oleh: Syafrizal Prabowo

Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Abstrak

Dewasa ini, dinamika politik di Indonesia semakin umum menjadi konsumsi masyarakat. Ormas terbentuk bukan semata untuk menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ideologi politik, juga karena fitrah dan tugasnya berbeda. Namun, ormas memiliki peran yang cukup besar sebagai pemersatu para aktor atau pelaku politik. Di Kabupaten Banjarnegara, ormas Syarikat Islam (SI) berperan besar dalam proses atau aktivitas politik.

Anggota SI Banjarnegara tercatat sebagai anggota beberapa Partai Politik yang berbeda. Sebagian menduduki jabatan di lembaga legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, beberapa anggota SI tergabung dalam Tim Sukses setiap pasangan calon mewakili Partai Politik yang berbeda.

Partisipasi Politik anggota SI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara tergolong tinggi. Mulai dari partisipasi politik yang terendah sampai Partisipasi Politik yang aktif yaitu sebagai Tim Sukses dalam Pilkada. Sebelumnya, pihak SI telah menghimbau kepada seluruh anggotanya dengan sebuah Maklumat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu tersebut. Namun, dengan catatan harus menjaga jarak yang sama terhadap semua Pasangan Calon.

Warga SI diperbolehkan berpolitik dengan ideologinya masing-masing namun tidak membawa nama besar Syarikat Islam. Partisipasi Politik yang tertinggi terbukti dengan adanya anggota SI yang tergabung dalam Tim Sukses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara.

Pendahuluan

Dalam kajian Ilmu politik terdapat beberapa fokus yang dapat dikaji lebih dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai ciri khas Ilmu sosial. Kajian Ilmu politik yang erat kaitannya dengan kelembagaan dan proses penyelenggaraan negara

menjadi fokus yang identik dengan Ilmu Politik. Namun, kajian Ilmu politik juga terdapat dalam elemen masyarakat sebagai objek yang erat kaitannya dengan budaya Indonesia. Wadah dari proses politik tersebut bermacam-macam, sesuai dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dan aspek-aspek yang terdapat di sekitarnya.

Dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini semakin menarik untuk dibahas. Mulai dari kebijakan pemerintah, partisipasi politik masyarakat, peran partai politik hingga kontestasi pemilihan umum. Semua dinamika politik yang terjadi dan sedang berlangsung di Indonesia tidak lepas dari berkembangnya pola-pola politik lokal masyarakat Indonesia itu sendiri, selain dipengaruhi oleh era yang berkembang. Misalnya saja partisipasi politik yang terus berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat.

Ormas dan parpol jelas berbeda, baik fitrah, tujuan, paradigmanya maupun UU yang mengaturnya. Tidak seperti ormas yang memiliki fungsi sosial, parpol memiliki tujuan untuk mengejar kekuasaan. Walaupun begitu, ormas dan parpol di Indonesia punya hubungan erat diantara mereka. Seperti pada tahun 1945 Ormas seperti NU, Muhammadiyah dan Syarikat Islam mendirikan Partai Masyumi. Kemudian NU dan Syarikat Islam masing-masing membentuk partai sendiri yaitu Partai NU dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Diantara Dewan Pimpinan Cabang SI di Indonesia, Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu wilayah kabupaten yang terdapat perwakilan Dewan Pimpinan Cabang SI, bersanding dengan beberapa Dewan Cabang ormas-ormas lain seperti Muhammadiyah, NU dan al Irsyad. Masing-masing ormas tersebut memiliki peranan yang berbeda dalam skala

wilayah Kabupaten Banjarnegara. Mereka berperan sesuai dengan ideologi organisasinya masing-masing dengan corak yang beragam, dan menggunakan pendekatan yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Mengutip data tahunan dan arsip dari Kantor Dewan Cabang SI Kabupaten Banjarnegara, organisasi ini memiliki reputasi yang baik dan berdiri sebagai organisasi yang sehat di Kabupaten Banjarnegara. Sesuai data, SI di Banjarnegara cenderung unggul dibanding ormas-ormas Islam lainnya.

Perilaku politik anggota/kader SI mengarah partisipasi dengan membawa ideologi SI sebagai dasar perilaku politiknya. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007 : 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Sesuai dengan judul penelitian ini, yang hendak diteliti oleh peneliti adalah partisipasi politik dari anggota/kader SI Banjarnegara. Peneliti hendak mendalami partisipasi politik anggota/kader SI pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara tahun 2017. Lalu, apa yang mempengaruhi partisipasi politik tersebut. Meski atas nama keluarga besar SI, organisasi tersebut menyatakan netral terhadap semua bentuk perilaku politik dalam keadaan dan situasi apapun, namun Ideologi SI memberi kebebasan kepada kadernya sebagai pribadi untuk melakukan proses politik sesuai yang dikehendaki.

Partisipasi Politik Syarikat Islam Banjarnegara

Syarikat Islam dalam arti organisasi secara luas berdiri berlandaskan ekonomi dan politik. Seperti apa yang telah digagas oleh HOS Tjokroaminoto. Gagasan guru bangsa tersebut, hingga kini masih dipertahankan oleh anggota SI secara umum di Indonesia. Hingga saat ini, gagasan ekonomi Tjokroaminoto dijadikan acuan oleh anggota SI dalam menjalankan bisnisnya atau dalam tujuan utama memperjuangkan Islam. Hal itu dapat dilihat dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh anggota SI di pusat (Jakarta) sampai daerah di daerah-daerah. Seperti di Kabupaten Banjarnegara, deretan toko yang terdapat di pusat kota beberapa dimiliki oleh anggota SI Banjarnegara. Bahkan, satu orang biasanya memiliki beberapa bisnis sekaligus. Konsep ekonomi yang digagas pendiri SI memang tidak kalah dengan strategi bisnis modern yang berasal dari luar Indonesia. Konsep tersebut yang menopang kelangsungan hidup Syarikat Islam di seluruh Indonesia.

Dalam bidang politik, SI juga masih memiliki peran meski sudah tidak lagi sebagai sebuah partai politik. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pernah berjaya pada masanya, yaitu sebelum tahun 1970-an. Setelahnya, pada orde baru semua partai Islam (NU, PSII dan Perti) ber-*fusi* atau disatukan menjadi satu yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sepak terjang politik SI tidak runtuh begitu saja, para pejuang politik SI tetap melanjutkan perjuangannya di dalam tubuh PPP. Meski dalam orde baru partai politik hampir tidak berkembang kecuali Golkar sebagai partai penguasa pemerintah.

Subekti (2009 : 1) menjelaskan, pada masa Reformasi, peranan SI makin terasa sebagai ormas sedangkan sebagai partai, sebagai aktivis SI yang mendirikan partai baru

gagal melewati *electoral threshold* sehingga gagal memiliki wakil di DPR/MPR. Hal ini merupakan titik balik dari peran besar yang pernah dilakukannya SI dan juga oleh PSII dari masa kolonial sampai masa orde baru. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan bagaimana masa depan SI. Dengan perannya sebagai ormas, SI bisa memberikan program-program untuk menjadikan “Islam sebagai alternative terhadap kapitalisme dan komunisme” seperti dikemukakan oleh Tjokroaminoto dalam bukunya yang terkenal *Islam dan Sosialisme*.

Sebagai partai, kader-kader SI belum berhasil mengumpulkan konstituen SI yang sudah tersebar dalam berbagai partai, untuk kembali seperti pada masa kejayaannya PSII pada masa Demokrasi Terpimpin dan awal orde baru. Dalam hubungan ini, SI dapat menjadi “organisasi induk” yang dapat melahirkan aktivis, politisi, dan organisasi lainnya seperti yang pernah dilakukan SI awal tahun 1920-an, yang melahirkan tokoh-tokoh dari PNI, PKI, Masyumi dan partai maupun ormas lainnya. Dengan peranan seperti itu, regimentasi politik orde baru dapat dilihat sebagai titik tolak bagi perubahan peran SI dari sebuah partai menjadi organisasi Islam yang mumpuni, yang melahirkan kader-kader untuk ormas dan partai-partai politik di Indonesia.

Salah satu proses politik dapat berupa partisipasi politik. Budiarto (2008 : 367) mengatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Dalam Tipologi Partisipasi Politik, partisipasi politik anggota SI tergolong partisipasi aktif. Informan yang dijadikan narasumber oleh peneliti adalah anggota SI yang sekaligus berperan aktif di dalam beberapa kegiatan politik. Seperti sebagai anggota partai politik dan kegiatan politik lain. Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, beberapa anggota aktif sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Banjarnegara tersebut.

Syarikat Islam (SI) memang bukan lagi partai politik dan hidup sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia. Namun, bukan berarti SI tidak terkait dengan politik. Keterkaitan antara SI dan politik tidak berhubungan secara langsung antar organisasi, melainkan secara individu. Beberapa anggota SI merupakan anggota atau kader partai politik. Hal tersebut wajar karena secara organisasi, SI tidak melarang anggotanya untuk aktif di berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Dengan catatan, tubuh besar organisasi SI tidak secara resmi berafiliasi atau terkait dengan kegiatan/aktifitas politik atau dengan partai politik. Namun, aktifitas tersebut dapat dikategorikan kedalam partisipasi politik secara individu.

Anggota Syarikat Islam (SI) adalah individu yang tergabung secara resmi dan terdaftar catatan internal keorganisasian SI. Untuk menjadi anggota SI, terdapat proses yang dinamakan *bai'at*. *Bai'at* adalah proses dimana anggota baru SI disumpah dan mengucapkan janji untuk berjihad di jalan Allah SWT melalui organisasi Syarikat Islam.

Sesuai AD/ART internal SI, keharusan syarat menjadi anggota SI adalah orang Islam, ditetapkan atas pertimbangan bahwa untuk menjadikan umat Islam bersatu terlebih dahulu harus dibangin kaum di seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada tali Allah yang tidak berpecah-pecah. Setelah menjadi anggota resmi Syarikat Islam individu akan bersedia berjihad memperjuangkan perjuangan Islam melalui organisasi SI. Perjuangan Islam dalam SI tertuang dalam visi misi dan AD/ART internal organisasi.

Sebelum menjadi anggota dalam kepengurusan besar SI, biasanya individu tersebut diawali dengan menjadi anggota Pemuda Muslimin Indonesia. Namun, ada juga yang langsung di *bai'at* menjadi anggota SI tanpa menjadi anggota Pemuda Muslimin terlebih dahulu. Pemuda Muslimin Indonesia adalah organisasi kepemudaan yang berada langsung dibawah SI. Pemuda Muslimin Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 November 1928 adalah organisasi pemuda yang merupakan organisasi sayap dari Syarikat Islam (SI) Indonesia bersama dengan unsur pemuda lainnya telah berperan aktif didalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam organisasi Pemuda Muslimin Indonesia, anggota akan memperoleh pendidikan dan pelajaran mengenai internal organisasi SI dan eksternal mengenai pandangan dan sikap tentang isu atau kejadian yang sedang berkembang. Dalam organisasi tersebut pula, para anggota yang masih berusia muda, mendapat pendidikan dan ajaran untuk menjadi pemimpin untuk meneruskan perjuangan Islam terutama ajaran HOS Tjokroaminoto.

Anggota Syarikat Islam (SI) khususnya SI di Banjarnegara, diperbolehkan menjadi anggota atau kader partai politik sebagai warga negara biasa. Aturan tersebut juga tertuang dalam AD/ART internal organisasi yang membebaskan anggota SI untuk berpolitik dan menjadi kader partai politik secara individu, bukan secara organisasi dan tidak bisa

dipertanggungjawabkan melalui organisasi. Justru profesi politik sejalan dengan cita-cita dan gagasan yang dibentuk oleh Tjokroaminoto yaitu agar SI bergerak di bidang ekonomi dan politik.

Menilik perjuangan SI kala itu, SI pernah menjadi sebuah partai politik. Setelah diubah namanya menjadi Sarekat Islam dan dipimpin oleh Tjokroaminoto, SI segera berkembang dan mencari jatidirinya. Sebagai upaya untuk memperkuat nilai ideologis serta organ pergerakan yang secara modern bergerak di jalur politik, pada 1921, SI diubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan baru pada 1923, partai ini secara resmi mulai berjalan. Untuk mencapai perjuangan yang lebih baik, perjuangan PSI lebih memihak terhadap gerakan *Pan Islamisme*. Melalui semangat *Pan Islamisme*, Tjokroaminoto (sebagai pimpinan besar partai) tetap menjadikan Islam sebagai dasar ideologi PSI.

Dengan diperbolehkannya anggota SI untuk melaksanakan aktifitas politik, anggota SI sah-sah saja mengikuti kampanye untuk salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Kecuali untuk anggota SI yang mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan untuk berkampanye atau terlihat mendukung salah satu calon dalam pemilu.

Terlepas dari anggota SI yang mengabdikan sebagai ASN, hampir seluruh warga SI berperan aktif dalam masa kampanye di masing-masing pasangan calon. Aktif berkampanye bukan berarti harus terdaftar sebagai anggota timses pasangan calon, namun sebatas mendukung sebagai simpatisan. Dukungan anggota SI secara individu menyebar dalam ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan keberagaman SI yang tidak hanya terhubung secara ideologi dengan salah

satu calon tertentu saja. Karena prinsip ajaran SI yang digagas Tjokroaminoto dapat diterapkan dalam banyak bentuk ideologi.

Anggota Syarikat Islam (SI) Banjarnegara tercatat mengisi nama-nama timses yang terbagi menjadi 3 kubu sesuai dengan pasangan calon sebanyak 3 pasangan. Sebagian besar anggota SI yang tergabung dalam timses resmi pasangan calon adalah anggota atau kader partai politik tertentu. Keberagaman anggota SI membuat peta dukungan warga SI hanya kepada salah satu pasangan calon, namun menyebar.

Syarikat Islam Banjarnegara menunjukkan masih sebagai organisasi yang memperjuangkan perjuangan politik meski tidak secara langsung. Dengan bukti di lapangan bahwa banyak anggota SI yang berada di balik pencalonan ketiga pasangan calon tersebut, ajaran politik Tjokroaminoto masih diperjuangkan hingga sekarang di Banjarnegara. Orang-orang SI yang berada dibalik pencalonan tersebut juga sebagian besar menduduki kursi DPRD Kabupaten Banjarnegara bahkan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di luar konstelasi politik Pilkada, mereka adalah pejuang politik melalui lembaga DPRD. Seperti yang dijelaskan Budiardjo (2010 : 74), partisipasi politik tersebut tergolong dalam partisipasi politik aktif karena partisipasi sampai pada level yang tinggi.

Meski SI bukan lagi organisasi politik atau partai politik, perjuangan politik SI masih diteruskan melalui individu lewat anggota-anggota yang menempati posisi strategis yang berpengaruh dalam bidang politik di Banjarnegara. Dimulai dari PSII yang mendominasi di DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 1971, hingga PSII melebur pada masa orde baru, perjuangan tersebut masih diteruskan dengan jalan partai politik yang berbeda-beda namun dengan rasa yang sama dengan ajaran dan prinsip SI dari

Tjokroaminoto. Kenyataan tersebut dibarengi dengan prinsip lain SI yaitu ekonomi kerakyatan yang juga mengambil peran di Kabupaten Banjarnegara melalui anggotanya.

Di Kabupaten Banjarnegara, warga SI menjalankan prinsip “sepandai-pandai *siyasa*h” melalui beberapa orang yang tergabung di dalam partai politik. Tercatat warga SI menjadi hampir seluruh anggota partai politik yang ada di Banjarnegara kecuali PAN dan PKB. Khusus untuk PAN dan PKB, mereka memiliki afiliasi khusus dengan ormas NU dan Muhammadiyah. Persebaran warga SI di partai politik yang berbeda-beda ideologi memiliki faktor-faktor yang memengaruhinya.

Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Surbakti (2010 : 140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu

kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah Surbakti (2010 : 186).

Partisipasi politik anggota Syarikat Islam Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ideologi anggota SI dalam organisasi adalah satu, tetapi orientasi politik masing-masing anggota SI berbeda-beda yang diwujudkan dalam sikap dan pandangan mereka yang berbeda. Perbedaan dan keragaman perilaku politik tersebut merupakan hal yang baik, selama tidak menimbulkan perpecahan di dalam tubuh organisasi. Lebih baik lagi jika perbedaan tersebut turut membangun Syarikat Islam sebagai sebuah organisasi.

Faktor yang memengaruhi setiap individu sangat beragam, sehingga perlu digali informasi dari masing-masing individu anggota SI dalam konteks partisipasi politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, meski mereka tergabung dalam partai politik yang sama atau tergabung dalam tim sukses yang sama. Keragaman tersebut menjadi variabel tersendiri dalam penelitian ini. Setelah melakukan observasi dalam penelitian kualitatif dengan metode *indepth interview* atau wawancara mendalam, peneliti berhasil menemukan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik anggota SI Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun

2017. Faktor-faktor tersebut sangat beragam. Peneliti hendak menjelaskan faktor-faktor tersebut berdasarkan temuan lapangan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 tanggal 15 Februari lalu yang termasuk dalam Pilkada Serentak di 101 daerah, keputusan arah dukungan partai politik di daerah berasal dari pengurus partai politik pusat. Keputusan tersebut melalui melalui proses yang panjang jauh sebelum pelaksanaan Pilkada. Meski, keputusan arah dukungan berasal dari pengurus partai politik pusat, namun salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut adalah usulan dari kader di daerah tempat pelaksanaan Pilkada. Kader partai politik di daerah memberikan usulan kepada pengurus pusat mengenai kondisi politik lokal kemudian yang kemudian dipertimbangkan oleh pengurus pusat sebelum memberikan keputusan.

Kondisi politik lokal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi politik anggota SI dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Kondisi politik lokal adalah kondisi politik di daerah tertentu yang terbentuk akibat proses-proses politik yang terjadi di sebuah wilayah (daerah). Proses-proses politik terjadi dan ditentukan oleh pola-pola komunikasi aktor-aktor politik setempat dengan pengaruh dari kondisi politik nasional. Kondisi politik lokal dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu.

Di daerah, khususnya Kabupaten Banjarnegara kondisi politik lokal menentukan arah dukungan partai politik kepada salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Kondisi politik lokal menjadi pertimbangan utama yang menentukan arah dan pembentukan koalisi partai politik selain faktor ideologi partai. Informasi dihimpun oleh kader-kader partai sebuah partai politik yang ada di daerah

kemudian internal partai politik melaksanakan rapat-rapat guna membahas sikap dan pandangan partai politik tersebut terhadap isu-isu yang ada.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, arah dukungan dan pembentukan koalisi untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 memiliki tahapan atau proses hingga pada pendaftaran pasangan calon ke KPU setempat. Pertama, partai politik memanfaatkan kadernya di *grassroot* untuk menghimpun informasi dengan metode semacam survey publik, informasi yang didapat akan dianalisis sembari melihat kondisi politik aktual di Kabupaten Banjarnegara. Setelah itu, pengurus partai politik di Kabupaten (DPC) melakukan koordinasi dengan partai politik di provinsi (DPW) dan diteruskan ke kepengurusan partai politik pusat (DPP).

Partai politik memiliki mekanisme hierarki yang membuat setiap keputusan strategis ada di tangan pusat. Namun mekanisme tersebut memungkinkan kader partai politik di daerah memengaruhi keputusan pusat dengan mengusulkan dan berkoordinasi dengan hierarki partai politik yang berada di atasnya, seperti penentuan peta dan arah dukungan partai politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 sampai pada tahapan pengusungan salah satu pasangan calon. Kenyataannya, tetap saja keputusan strategis berada di tangan pusat.

Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, faktor latar belakang agama menjadi hal yang paling mendasar mengenai pilihan politik dalam partisipasi politik seseorang. Mulai dari partisipan politik pasif hingga partisipan aktif seperti para anggota SI yang tergabung dalam tim pemenangan calon.

Sesuai AD/ART internal SI, keharusan syarat menjadi anggota SI adalah orang Islam, ditetapkan atas pertimbangan bahwa untuk menjadikan umat Islam bersatu terlebih dahulu harus dibangin kaum di seluruh Indonesia yang berpegang teguh pada tali Allah yang tidak berpecah-pecah. Sehingga akan menjadikannya sebahagian dari persatuan umat Islam sedunia. Azas tersebut menjadi tolak ukur warga SI dalam menjalani kehidupan sehari-harinya termasuk pilihan politiknya dalam sebuah partisipasi politik. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, faktor agama menjadi penentu dukungan. Dalam observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara, anggota SI yang berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 mengaku mengharuskan calon bupati yang maju beragama Islam.

Budaya politik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi politik anggota Syarikat Islam (SI) Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Pengaruh budaya politik melekat pada setiap warga Indonesia yang lahir dan tumbuh di Indonesia yang mengilhami nilai-nilai yang berkembang di Indonesia.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, partisipasi politik anggota SI tidak terlepas dari faktor pengaruh budaya politik yang dari proses internalisasi pribadi yang dijalani masing-masing individu. Budaya politik terbentuk dengan proses yang lama bahkan sepanjang hidup seseorang. Dalam konteks aktor politik, budaya politik yang memengaruhi setiap individu berbeda-beda. Bahkan dalam sebuah

partai yang sama, budaya politik yang membentuk setiap individu berbeda-beda, karena individu tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda.

Menurut Almond dan Verba dalam (Gaffar, 2006 : 99) budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi di dalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective*, dan *evaluative*.

Budaya politik yang tercipta di kalangan warga SI tidak terlepas pada sejarah panjang arah perjuangan SI yang ditempuh melalui jalur politik diwarnai dengan pengaruh ajaran agama Islam. Arah perjuangan tersebut melahirkan gagasan-gagasan pokok politik SI dari Tjokroaminoto dan penerusnya yang tetap dipegang hingga sekarang. Meski SI saat ini hidup sebagai orgmas Islam, namun perjuangan politik SI masih terus didengungkan melalui kadernya yang aktif di dunia politik khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Dalam perjuangannya, warga SI tetap memegang teguh ajaran tersebut melalui proses internalisasi yang panjang.

Keputusan arah dukungan partai politik di Banjarnegara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 oleh kepengurusan partai politik pusat adalah sebuah budaya politik yang sudah terjadi sejak lama. Kemudian, budaya yang berkombinasi dengan ideologi yang membuat contohnya PDI-P dan PKS sulit untuk berada di pihak yang sama. Meski saat berbicara ideologi mereka masing-masing, antara ideologi nasionalis dengan perjuangan Islam adalah bukan hal yang bertolak belakang. Bahkan, pendiri SI juga menjadi salah satu penggagas ajaran nasionalis pada waktu itu.

Kemudian politik aliran dari beberapa kalangan masyarakat yang terbukti masih ada meski sudah mulai pudar. Golongan masyarakat masih memilih pemimpin atau partainya berdasarkan latar belakang sama. Misalkan Nahdliyin masih memilih siapapun sosok asalkan dari PKB. Berlaku juga pada warga Muhammadiyah yang berada dibalik suara-suara PAN. Namun belakangan politik aliran sudah mulai pudar. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 warga NU tidak selamanya memilih pasangan calon yang diusung oleh PKB. Nampaknya budaya tersebut sudah mulai bergeser dan masyarakat lebih objektif melihat sosok figur.

Proses yang dapat dikategorikan sebagai budaya politik tersebut berlaku pada tataran politik lainnya, tidak hanya pada ormas SI dan tidak hanya pada Pilkada, namun terjadi secara menyeluruh sebagai bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Budaya politik akan tetap menjadi faktor yang berpengaruh dalam proses politik di Indonesia karena berkaitan dengan sejarah yang sudah, sedang dan akan terus berlanjut. Bagi beberapa golongan, budaya adalah hal yang harus terus dilestarikan dan tidak boleh diganggu gugat. Namun, dalam konteks politik yang memiliki perkembangan di setiap zamannya, tidak ada hal yang selamanya sama. Demi bertahan hidup ditengah perkembangan zaman, partai politik harus mulai lincah dalam menyesuaikan diri. Langkah mudahnya adalah dengan mulai menghilangkan cara-cara politik lama yang dianggap sudah tidak lagi efektif diterapkan di zaman yang baru.

Partai politik yang memiliki fungsi untuk sosialisasi politik dan pendidikan politik harus berperan lebih aktif tidak hanya di dalam internalnya namun juga sampai kepada tataran masyarakat biasa. Pendidikan politik tersebut harus mereka gagas secara interaktif dan aktual sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi, budaya politik yang dianggap

masih relevan tidak perlu buru-buru untuk diubah atau diganti. Elite dan kader partai politik harus sama-sama jeli memilah budaya politik, jika itu perlu diubah maka hal itu dianggap sebagai konsekuensi sebagai partai politik jika ingin bertahan hidup, tetap mendapatkan dukungan dari massa dan memegang cukup legitimasi dari masyarakat luas sebagai konstituen.

Kesimpulan

1. Syarikat Islam (SI) sebagai salah satu organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia menerapkan prinsip terbuka terhadap beberapa bentuk perkembangan di sekitarnya. Pihak SI mempertahankan hal-hal yang relevan untuk dipertahankan dan meninggalkan hal-hal yang dirasa sudah tidak cocok dengan kondisi kebangsaan yang ada pada saat ini. Sikap terbuka tersebut ditunjukkan dengan kebebasan individu anggota SI untuk berpolitik atau sebagai aktor politik yang artinya menjalankan proses atau kegiatan politik padahal dirinya adalah anggota sebuah ormas Islam. Asalkan, Perilaku Politik atau Partisipasi Politik tersebut dilakukan atas nama individu bukan atas nama organisasi. Prinsip tersebut juga kemungkinan diterapkan kepada ormas-ormas Islam lain selain SI.
2. Dengan penerapan prinsip terbuka dan menanamkan nasionalisme, kesadaran politik di kalangan warga SI menjadi tinggi. Walaupun bukan sebagai organisasi politik, SI memiliki prinsip bahwa berpartisipasi dalam kegiatan politik adalah hal yang positif sebagai warga negara yang baik, setidaknya dengan menggunakan hak pilihnya dalam

Pemilu. Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

3. Kesadaran politik warga SI yang tinggi, membuat beberapa warga SI berperan sebagai aktor politik di Kabupaten Banjarnegara. Partisipasi politik tersebut termasuk dalam Partisipasi Politik yang aktif atau partisipan. Beberapa anggota SI Banjarnegara tercatat sebagai anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Banjarnegara dan Jawa Tengah dan beberapa juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan, bahwa peran ormas Islam khususnya SI dalam tataran politik adalah besar. Meski melenceng dari fitrah ormas yang bukan bertujuan meraih kekuasaan atau berpolitik, namun kenyataan tersebut adalah hal yang positif, terutama bagi kalangan umat Islam yang menginginkan perjuangan Islam tetap di perjuangkan salah satunya melalui jalur politik.
4. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017, peran warga SI cukup besar. Beberapa warga SI yang juga sebagai anggota beberapa Partai Politik turut berperan aktif sebagai Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan data, anggota SI tersebar dalam semua Pasangan Calon yang ada (3 pasangan calon). Namun, anggota SI paling banyak terdapat pada Pasangan Calon nomor urut 3 (Budhi Sarwono – Syamsudin) yang juga menjadi pemenang resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara dalam Pilkada Serentak 2017. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 (Bendahara Partai Golkar Kabupaten Banjarnegara) adalah anggota SI. Juga Sekretaris Tim Pemenangan yang juga Wakil Ketua PPP Kabupaten Banjarnegara adalah anggota SI. Kemudian beberapa anggota SI lain yang berperan dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Selain karena instruksi dari Partai Politiknya masing-masing, arah dukungan setiap individu anggota SI kepada masing-masing Pasangan Calon dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang agama dan faktor budaya politik. Faktor-faktor yang memengaruhi Partisipasi Politik tersebut membentuk orientasi politik masing-masing individu anggota SI yang kemudian menentukan arah pilihannya kepada salah satu Pasangan Calon. Namun, pengaruh terkuat adalah instruksi dari Partai Politiknya masing-masing yang berasal dari Dewan Pengurus Partai di pusat. Kader-kader di daerah seperti anggota SI hanya melaksanakan amanat dan menjalankannya sesuai dengan tujuan dari Partai Politik.